

REVITALISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF GLOBAL
Momon Sudarma

Abstraksi

Dalam menghadapi tantangan dan isu global, revitalisasi pendidikan IPS perlu dilakukan dalam tiga aras, yaitu ontologis, epistemologi dan aksiologinya. Dengan adanya revitalisasi dalam aspek tersebut, akan berdampak pada pembangunan karakter keilmuan dari IPS itu sendiri. Seiring dengan pemikiran ini, ada enam hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan revitalisasi IPS di Indonesia, yaitu (1) menggeser dari hard-skill ke soft-skill, (2) orientasi pada konteks, (3) orientasi pemberdayaan dan pembudayaan, (4) pemanfaatan multimedia, (5) peran meningkatkan kebanggaan terhadap bangsa, serta (6) orientasi praksis dan rekayasa sosial.

Kata kunci : pembelajaran IPS, era global dan perubahan sosial

Pendahuluan

Dalam mengawali millennium III ada beberapa perubahan dasar dalam perilaku masyarakat dunia. Ketika orang sudah merasa tidak cocok dengan pendekatan refresif atau militerisme, upaya untuk menata hubungan internasional atau komunikasi pembangunan antar Negara dikembangkan dengan menggunakan pendekatan *soft-power* sebagai bentuk diplomasi dengan Negara lain. Pendekatan *soft-power* ini, bukan hanya dilakukan oleh Negara besar namun banyak dilakukan pula oleh Negara-negara kecil dalam melakukan komunikasi pembangunan atau komunikasi internasional.

Pada sisi lain, era kejayaan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam atau sumberdaya material sudah mulai menunjukkan kelemahannya, dan para pelaku ekonomi dunia mulai memunculkan kesadaran baru. Kalangan manajemen memandang bahwa faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sebuah perusahaan, tidak lagi terfokus pada masalah sumberdaya alam atau sumberdaya material namun lebih

menekankan pada aspek *intellectual capital*¹. Dalam konteks ini Stewart (2002) dan Sangkala (2006) merasa yakin bahwa manajemen modal intelektual merupakan kekayaan strategis dan sumber keunggulan perusahaan di masa yang akan datang.

Pandangan yang serupa dengan masalah ini, dikemukakan pula oleh seorang futuris dari Amerika Serikat. Patricia Aburdene (2006) yang menengarai bangkitnya spiritualisme dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia di abad ini. Bahkan Aburdene menyebutnya sebagai megatren 2010 dalam dunia ekonomi kapitalis².

Bila paparan tersebut disederhanakan, dapat dikatakan bahwa

¹ Sangkala. *Intellectual Capital Management : Strategi baru Membangun Daya Saing perusahaan*. Jakarta : YAPENSI. 2006. Lihat pula Stewart, Thomas A. *Intellectual Capital : Modal Intelektual, Kekayaan Baru Organisasi*. Penerjemah Reza Gunawan. Yakarta : Elex Mdia Komputindo. .2002

² Patricia Aburdene. *Megatrends 2010 : Bangkitnya Kesadaran Kapitalisme*. Penerjemah Arfan Achyar. Jakarta : Agromedia Pustaka. 2006

kesadaran tentang peran pemberdayaan manusia dan atau ilmu kemanusiaan, khususnya ilmu sosial merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pentingnya pengedepanan soft power dalam diplomasi dunia menunjukkan pentingnya komunikasi kemanusiaan, interaksi kemanusiaan dan atau hubungan yang humanis antar manusia. Dengan kata lain keterampilan sosial (*social skill*) sebagaimana dikembangkan dalam ilmu pengetahuan sosial menjadi sangat penting untuk dimiliki insan masa depan. Hal ini selaras dengan pentingnya pengembangan modal intelektual atau spiritualisme sebagaimana yang kemukakan Aburdene.

Dengan bersandar pada pemikiran tersebut, hipotesis yang diusung dalam wacana ini, yaitu pentingnya pemberdayaan atau revitalisasi ilmu pengetahuan sosial sebagai bagian dari upaya menata tatanan dunia yang baru (*the new world*).

Skenario Revitalisasi IPS

Dalam konteks global, setidaknya ada tiga perubahan dasar yang berkembang di lingkungan masyarakat modern. Pertama, perubahan dalam peraturan global (*regulation changes*) yaitu dari monopoli ke era kompetisi terbuka. Kedua, perubahan semangat pasar (*market changes*), yaitu dari pasar yang terproteksi ke pasar bebas atau dari pasar yang berorientasi produk ke arah pasar yang mengendalikan (*driven market*). Terakhir yaitu perubahan dalam teknologi (*technological changes*)³. Perubahan satu dengan

yang lainnya tidak berpisah secara tegas. Aspek satu dengan aspek yang lainnya berkembang saling bersinggungan bahkan saling mempengaruhi (*interchanges*). Dinamika dan variasi interaksi antar faktor itulah yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dasar era global menunjukkan perbedaan nyata dengan era peradaban sebelumnya.

Tanpa harus terjebak pada istilah yang kemudian melahirkan perdebatan yang *complicated*, penulis memandang bahwa perubahan sosial ini sudah tentu merupakan kelanjutan sejarah manusia masa lalu⁴. Apapun model perubahan sosialnya, apapun namanya apakah itu evolusi, revolusi atau ekses dari modernisasi yang dikembangkan masyarakat di masa lalu, masa kini dan masa depan merupakan bagian dan kelanjutan dari sejarah peradaban manusia.

Dengan kata lain, untuk mempertahankan eksistensi sebuah ilmu—termasuk IPS—perlu mempertimbangkan aspek-aspek perubahan sosial yang terjadi saat ini. Namun demikian, hukum sosial tetap perlu diperhatikan bahwa "merubah sebuah tatanan sosial hari ini tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang melahirkan kondisi sosial hari ini terjadi". Dengan kata lain, dalam menghadapi

Nasional Manajemen Perguruan Tinggi. Bandung 28 March 2005

⁴ Maksud yang dianggap sebagai sesuatu yang kompleks tersebut yakni masalah definisi, apakah saat ini termasuk modern atau postmodern, atau malahan fundamentalisme rasional. Istilah-istilah ini masih menjadi bahan perbincangan di kalangan ahli studi budaya dan ilmuwan social. Untuk sekedar contoh wacana yang mengulas masalah ini dapat dilihat Yasraf Amir Piliang. *Transpolitika : Dinamika Politik di Dalam Era Virtual*. Yogyakarta : Jalasutra. 2005

³ Azril Azahari. "Isu-Isu Strategis, Peluang dan Tantangan Perguruan Tinggi di Indonesia". Makalah pada Seminar

tatanan masyarakat baru tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial yang telah melahirkan keadaan masyarakat saat ini.

Untuk menjawab masalah ini, upaya yang dapat dibangun oleh masyarakat ilmu pengetahuan sosial saat ini yaitu melakukan pergeseran karakter pembelajaran mengenai IPS. Dalam kesempatan ini, ada beberapa karakter dasar pergeseran pembelajaran IPS yang dapat dijadikan acuan awal dalam meningkatkan peran dan fungsi pembelajaran IPS di era global.

Pertama, pembelajaran IPS perlu digeser dari *hard-skill oriented* menjadi *soft-skill oriented*. Dalam beberapa waktu lalu para pembelajar IPS lebih senang dan getol melakukan transfer pengetahuan kepada anak didiknya, baik di bangku kuliah maupun pendidikan dasar-menengah. Tradisi seperti ini dapat disebut sebagai contoh kecil dari tradisi *hard-skill oriented*, yaitu yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau wawasan keilmuan dari pengetahuan IPS.

Dibalik itu semua sesungguhnya ada kebutuhan yang lebih penting lagi yaitu pemilikan mental dan budaya hidup yang unggul dan kompetitif. Pembelajaran yang berorientasi pada mental dan budaya unggul, seperti jiwa entrepreneurship, leadership, dan kemandirian merupakan bagian dari pembelajaran mengenai *soft-skill oriented*. Pada konteks inilah, pentingnya intellectual capital menjadi sangat penting sebagai sumberdaya keunggulan individu atau perusahaan di masa mendatang. Karena dengan *soft-skill* seperti ini, seseorang tidak terpaku pada pengetahuan yang dimilikinya atau keterampilan yang dipunyainya, namun bergantung pada semangat kreatif, inovasi dan kesungguhan kerja untuk

melakukan pembelajaran seumur hidup. Hanya individu yang memiliki semangat kerja keras, mandiri, dan inova-kreatif inilah yang akan memiliki peluang eksis di masa mendatang⁵.

Berdasarkan cermatan tersebut, maka pembelajaran IPS di masa depan bukan hanya menekankan pada aspek *hard-skill* ke-IPS-an melainkan pada aspek *soft-skill* ke-IPS-an.

Kedua, untuk meningkatkan kepekaan sosial seorang siswa maka sumber pembelajaran IPS tidak hanya terpaku pada buku text (*books text oriented*). Pembelajaran IPS yang dapat mendorong nilai-nilai *soft-skill* adalah pembelajaran kontekstual dan praktek. Realitas sosial dan media informasi (baik media cetak maupun elektronik) perlu dijadikan sebagai bagian dari sumber belajar.

Keterpakuan pada kurikulum atau prosedur baku terhadap wacana sebagaimana yang disajikan oleh buku teks hanya akan menyebabkan lemahnya kreativitas anak didik dan mandulnya *soft-skill* peserta didik. Selaras dengan pemikiran ini, Heru Nugroho (2002:vii) mengatakan bahwa dalam konteks pembakuan kurikulum dan prosedur akademik hanya melahirkan turunnya daya kreativitas serta bersikap pragmatis dan teknis dari kalangan peserta didik⁶. Oleh karena itu, seorang guru (pembelajar) IPS dituntut memiliki kemampuan untuk memberdayakan sumber belajar secara maksimal dari sumber-sumber media massa atau lingkungan sosial. Seorang

⁵ Ibid. Sangkala. 2006. Intellectual Capital Management.....

⁶ Heru Nugroho. "Pengilmiahan dan Ambiguitas Sosiologi" Kata Pengantar dalam *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Yulia Sugandi. 2002.

tenaga pendidik (guru maupun dosen) dituntut memiliki kemampuan dalam mengemas sumber informasi yang memberdayakan, mencerahkan dan membudayakan peserta didik dan bukan memperdaya peserta didik.

Ketiga, pembelajaran IPS yang memberdayakan dan membudayakan. Dalam konteks teori, pembelajaran yang memberdayakan dan membudayakan adalah pendidikan yang memberikan rangsangan intelektual dan nilai praksis, sehingga individu mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan menjadi anggota masyarakat. Meminjam pandangan Karlina Leksono-Supeli (1988: xxvi) karakter pendidikan yang perlu dibangun yaitu proses pendidikan yang harus mampu memberikan rangsangan intelektual atau kegairahan belajar pada anak didik⁷. Dalam pandangan dia, proses pembelajaran baik yang dilaksanakan dalam kelas maupun luar kelas seyogyanya menciptakan lingkungan pembelajaran dan proses pembelajaran yang memberdayakan, menyenangkan dan mendorong anak untuk menggali pengetahuan lebih luas.

Tuntutan dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan ini sejalan dengan rambu-rambu standar proses pembelajaran menurut Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19, dinyatakan bahwa⁸ :

⁷ Karlina Leksono-Supeli. "Kata Pengantar" dalam *Ke Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran*. Edward B. Fiske. Terjemahan. Jakarta : Grasindo. 1988.

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Peran dan fungsi ini, dapat dikembangkan dengan maksimal, manakala setiap tenaga pendidik atau pembelajar IPS mampu menyadari pentingnya pemberdayaan sosial. Suburnya masyarakat dunia menggunakan pendekatan partisipasi dan *community development* merupakan contoh lain penerapan IPS dalam konteks pemberdayaan dan pembudayaan.

Keempat, pemanfaatan multimedia sebagai alat pemberdayaan *omnipotence* (anekabakat) individu. Dalam metode *quantum learning* peran terpenting dari seorang guru bukan dalam peran transfer pengetahuan, melainkan peran dalam menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan.⁹ Dengan terbangunnya lingkungan belajar yang menyenangkan, mulai dari cara berinteraksi, model pembelajaran, metode mengajar sampai pada alat bantu yang digunakan, sesungguhnya lebih penting dari sekedar menjelaskan sebuah pengetahuan yang harus dihapal oleh anak didik.

Howard Gardner misalnya, memberikan keterangan bahwa setiap

⁹ Howard Gardner. 2002. *Kecerdasan Majemuk: Teori dalam Praktek*. Batam: Interaksara.. lihat pula Dave Meier. *The Accelerated Learning*. Bandung : Mizan. 2002. Terjemahan Rahmani Astuti.

manusia itu adalah makhluk yang cerdas. Hanya saja kecerdasan individu itu memiliki keunikan masing-masing. Setiap keunikan individu itu harus didekati dengan model pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran IPS yang memberdayakan diantaranya adalah dengan memanfaatkan multimedia sebagai bagian dari upaya merangsang multipotensi atau potensi indrawi anak untuk meningkatkan hasil belajar.

Salah satu keunggulan multimedia yaitu mampu memberikan rangsangan terhadap lebih dari satu indrawi. Karakter seperti itu, merupakan potensi besar untuk meningkatkan raih nilai akhir pembelajaran. Mahesa Kapadia, dkk. (2006:135) mengatakan bahwa salah satu trik untuk mendongkrak daya ingat dapat dilakukan dengan membangun suasana dan proses pembelajaran yang dapat merangsang *multi-indrawi*¹⁰. Hemat kata dengan menggunakan multimedia atau sarana teknologi informasi (*information technology*) maka otak kanan-otak kiri atau indra pendengaran, penglihatan serta potensi indrawi yang lainnya terangsang secara bersamaan.

Kelima, pendidikan IPS harus diorientasikan untuk memunculkan rasa bangga (*dignity*) sebagai bangsa Indonesia. Sikap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat adalah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan masyarakat IPS, namun pembelajaran mengenai cinta tanah, patriotisme, tanggungjawab pada bangsa dan negara merupakan tanggungjawab guru IPS terhadap bangsa dan negaranya. Hal ini bukan hanya terkait dengan semangat pembukaan UUD 1945, namun terkait pula dengan tujuan

dasar pendidikan nasional. Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 dinyatakan bahwa 'pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan *menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab* (cetak miring dari penulis)'.¹¹

Kebutuhan untuk membangun rasa bangga dan cinta tanah air ini, tertangkap pula dari semangat geopolitik-nasionalisme pembangunan dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bumi dan air, dan segala isinya di kuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal ini merupakan landasan hukum pentingnya (1) pendidikan geopolitik sumberdaya alam Indonesia yang meliputi wilayah daratan dan lautan, hal ini seiring sejalan dengan pentingnya pendidikan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi bangsa Indonesia (2) pendidikan politik mengenai kedaulatan teritorial Negara Indonesia dan hal ini seiring sejalan dengan pentingnya pendidikan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah dan terakhir (3) yaitu pendidikan mengenai kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola berbagai hal modal dasar bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negaranya.

¹⁰ Mahesa Kapadia, dkk. 2006. *Mendongkrak Daya Ingat : Untuk Orang Yang Mudah Lupa*. Bandung : Kapadia.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selama ini, baik peneliti maupun siswa belajar mengenai geografi sumberdaya alam Indonesia baru sampai pada pendataan dan penjelasan. Setelah itu mereka belum mampu membangkitkan semangatnya untuk menjaga kekayaan alam atau memanfaatkan kekayaan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan dalam banyak kasus, mereka yang mengetahui mengenai sumberdaya alam bukan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat malah dijual ke pihak asing untuk kepentingan diri dan kelompok. Sikap yang terakhir tersebut, jelas-jelas merupakan anomalia dari hasil proses pendidikan IPS tentang geopolitik sumberdaya alam dan geopolitik pembangunan Indonesia.

Terakhir, pendidikan IPS harus diarahkan untuk menjadi bagian dari rekayasa sosial (*social engeneering*). Bila IPS hanya sekedar analisis atau hanya sekedar deskripsi, kehadiran IPS ini akan sangat kurang dirasakan oleh masyarakat. Ilmu Ekonomi secara mandiri, memiliki citra yang lebih baik dibandingkan ilmu sosial lainnya (misalnya geografi), karena ilmu ini dirasakan oleh masyarakat dan pengambil kebijakan dalam konteks rekayasa sosial. Antropologi sempat menjadi ilmu yang favorit di masa sebelum Perang Dunia II, atas peran Antropologi dalam memahami koloni-koloni bangsa Eropa di belahan bumi yang lainnya. Begitu pula ilmu politik yang banyak digunakan untuk analisis dan pemetaan masalah global dan hubungan internasional.

Bercermin pada sejarah ilmu sosial tersebut, maka perdagangan global, komunikasi global dan interaksi kemanusiaan global, menuntun setiap individu untuk belajar ilmu sosial. Dengan kata lain, pembelajaran IPS di

masa kini *wajib aqli* hukumnya (sudah harus) untuk mengutamakan pendekatan praksis dan peran rekayasa sosial. IPS harus mengedepankan karakter ilmu partisipatifnya dalam proses penataan masyarakat, dan bukan sekedar analisis atau deskripsi semata.

Penutup

Merujuk pada analisis ini, fenomena lemahnya *sense of crises* dari para pejabat, lunturnya nasionalisme, tingginya potensi disintegrasi, semangat demokrasi yang bercampur dengan anarkhis, tingginya kriminalitas dan KKN merupakan eksese nyata pendidikan IPS yang lebih mengarah pada kognitif, dan tidak mengarah pada nilai-nilai *soft-skill*, serta pemberdayaan diri menuju masyarakat berbudaya unggul. Fenomena tersebut merupakan bentuk kegagalan pembelajaran IPS dalam membangun kesadaran kemanusiaan, kesadaran sosial, kesadaran kebangsaan dan kesadaran kebhinekaan bangsa Indonesia.

Menghadapi kenyataan ini, guru IPS memiliki tanggungjawab moral dan tanggungjawab akademik untuk membangun karakter bangsa atau karakter generasi muda yang *warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab*. Hemat kata, ada tiga tingkat karakter pembelajaran IPS di masa global ini. Pertama, secara ontologi pembelajaran IPS adalah pembelajaran mengenai proses penyadaran, pemberdayaan dan pembudayaan nilai kepada anak didik untuk menjadi individu sekaligus warga negara. Kedua, secara epistemologi pembelajaran IPS harus mengedepankan pendekatan multikultur dan multiapproach, hal ini terkait dengan realitas kebhinekaan masyarakat dan

keanekaragaman potensi anak didik¹². Terakhir, secara aksiologis pembelajaran IPS diarahkan untuk meningkatkan tanggungjawab peserta didik sebagai individu, masyarakat negara dan masyarakat global, atau dalam istilah formal perundangan di Indonesia yaitu menjadi *warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab*.

¹² HAR Tilaar. *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo. 2004.